

Judul : KKP bersihkan pantai, kayu sisa banjir jadi bahan bakar PLTU
Tanggal : Rabu, 24 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

KKP Bersihkan Pantai

Kayu Sisa Banjir Jadi Bahan Bakar PLTU

FOTO IG PRIKADI



Alex Indra Lukman

KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) beraksi membersihkan Pantai Muaro Gantiang, Padang, dari tumpukan sampah kayu yang hanyut akibat banjir bandang. Tumpukan kayu tersebut dimanfaatkan untuk bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Sirih.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman menilai, pemanfaatan sampah kayu untuk listrik itu merupakan langkah tepat dan memiliki dasar hukum yang jelas. Dia memuji kolaborasi yang terjalin antara KKP dan PT PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Teluk Sirih.

"Kolaborasi KKP dengan PT PLN Indonesia Power UBP Teluk Sirih ini, merupakan implementasi amanah UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah," ungkap Alex di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Alex menegaskan, selain pemerintah pusat melalui KKP, pemerintah daerah juga memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan sampah kayu banjir sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, pemanfaatan mate-

rial kayu itu dapat berdampak signifikan.

Daerah bisa mempercepat pembangunan pada masa pemulihan pascabencana. "KKP telah memberikan contoh bahwa sampah kayu itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan PLTU Teluk Sirih," terang Ketua PDI Perjuangan (PDIP) Sumatera Barat tersebut.

Ia pun menantang pemerintah daerah untuk mengambil langkah serupa sesuai kebutuhan wilayahnya. "Kini, tinggal gubernur atau bupati dan wali kota. Apakah mau memanfaatkan kayu-kayu tersebut untuk keperluan pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) bagi korban banjir di daerah yang dipimpinnya," ujar Alex.

Menurutnya, material kayu hasil banjir bandang itu memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan kembali. Kayu-kayu tersebut dapat digunakan untuk pembuatan kusen, pintu, jendela, hingga kuda-kuda rumah, bahkan untuk kebutuhan konstruksi jembatan darurat.

"Melihat jenis dan bentuk kayu yang hanyut, kayu-kayu tersebut memang cocok untuk dimanfaatkan kembali untuk kepentingan yang lebih strategis dalam penanganan dampak bencana," tegasnya.

Namun demikian, Alex mengingatkan pentingnya kepastian hukum. Jika pemerintah daerah menilai kayu-kayu tersebut tidak diperlukan, maka harus ada kejelasan aturan bagi masyarakat yang ingin memanfaatkannya.

"Jika tak ada kepastian hukumnya, kayu-kayu yang kini menghambat aktivitas nelayan untuk melaut itu, berpotensi besar untuk dimanfaatkan para mafia kayu yang telah membatat hutan kita," tegasnya. ■ BYU